

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

2.1.1.1. Definisi dan Indikator Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum yang diperlukan untuk hidup layak. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang mencakup dua komponen utama Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu mengukur pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2100 kilokalori per orang per hari. Selanjutnya, Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yaitu mengukur pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar non-makanan, seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

Garis Kemiskinan adalah garis pemisah antara miskin dan tidak miskin (Susanto & Pangesti, 2019). Perhitungan garis kemiskinan menggunakan rumus:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)

Dengan menghitung kedua komponen ini, BPS menentukan garis kemiskinan total. Individu atau rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ini dikategorikan sebagai miskin. Sejak Desember 1998, BPS menggunakan standar kemiskinan baru yang merupakan penyempurnaan standar yang lama. Penyempurnaan ini meliputi perluasan cakupan komoditi yang

diperhitungkan dalam kebutuhan dasar. Penyempurnaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan keterbandingan antardaerah dan antarwaktu yang disebabkan adanya perbedaan tingkat harga antardaerah, yaitu dengan cara melakukan standardisasi harga terhadap harga di DKI Jakarta. Penyempurnaan standar kemiskinan ini diharapkan dapat mengukur tingkat kemiskinan secara lebih realistis. (BPS, 2024).

Merangkum dari Gani (2021), berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar ada 3 indikator kemiskinan yaitu:

1. *Head Count Index* (P0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P2) yaitu indikator yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks semakin besar ketimpangan pengeluaran mereka.

Foster-Greer-Thorbecke (FGT) telah merumuskan formula ukuran untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh Head Count Index (P0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2).

2.1.1.2. Jenis Kemiskinan

Menurut Todaro (2011) kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dianggap mengalami kemiskinan absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Konsep kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan demi kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang dikategorikan miskin relatif jika ia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya namun kondisi hidupnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya. Jadi meskipun seseorang mungkin berada di atas garis kemiskinan absolut, mereka tetap dianggap miskin jika dibandingkan dengan standar hidup umum dalam masyarakat. Kemiskinan ini menggambarkan tidak meratanya distribusi pendapatan.

Sementara itu, Pinontoan (2020) dalam bukunya menjelaskan ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering disebut fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan bahkan pada umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali. Selain itu juga tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini juga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau umumnya tidak buta huruf.
3. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini memiliki kehidupan yang relative lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Bahkan dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan. Namun kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

2.1.1.3. Teori Kemiskinan

Susanto & Pangesti (2019) menjelaskan beberapa teori kemiskinan yaitu:

1. Teori Neo Liberal dari Shanon et.al

Teori Neo Liberal berpendapat bahwa kemiskinan adalah masalah individu yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan dari orang itu sendiri. Teori ini meyakini bahwa kemiskinan dapat hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar diperluas dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan. Peran keluarga, kelompok swadaya dan lembaga keagamaan sangat penting dalam penanganan kemiskinan. Peran negara hanya sebagai pengawas dan campur tangan apabila lembaga tersebut sudah tidak mampu menjalankan fungsinya.

2. Teori Sosial Demokrat

Berbeda dengan Neo Liberal, kelompok Sosial Demokrat ini menganggap kemiskinan bukanlah masalah individu, melainkan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat, terutama karena akses terhadap sumber daya ekonomi yang terhambat. Teori ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam menangani kemiskinan.

3. Teori Marjinal dari Lewis

Konsep terkenal dari Teori Marjinal Lewis, yaitu "Culture of Poverty," yang mengatakan bahwa masyarakat menjadi miskin akibat suatu budaya. Kondisi ini ditandai oleh sifat apatis, kurangnya usaha, penerimaan terhadap nasib, sistem keuangan yang tidak stabil, pendidikan yang rendah, serta kurangnya ambisi untuk membangun masa depan. Bahkan kemiskinan juga sering kali disertai dengan masalah kesejahteraan dan kekerasan.

4. Teori Development (Teori Pembangunan)

Teori ini berkembang dari teori-teori ekonomi pembangunan, terutama neoliberalisme. Teori Development menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat masalah ekonomi yang dianggap tidak adil.

5. Teori Struktural

Teori ini diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank. Kelompok ini mengatakan bahwa kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor budaya atau pembangunan ekonomi, melainkan oleh politik ekonomi global.

2.1.1.4. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi sosial yang timbul pada masyarakat, terutama bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini tidak terjadi secara alami atau muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi dan disebabkan oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Hafidah dalam Sartono (2023) menyebutkan beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, enggan bekerja, kesempatan kerja yang terbatas, SDA dan modal terbatas, tingginya biaya hidup serta rendahnya kualitas kesehatan. Kemiskinan juga muncul karena:

1. Faktor Individu yaitu kemiskinan dilihat sebagai hasil dari karakter, pilihan, atau kapabilitas seorang individu. Misalnya, seseorang mungkin menjadi miskin karena kurangnya keterampilan, ketidakmampuan untuk bekerja, atau pilihan hidup yang tidak produktif.
2. Penyebab Keluarga. Dimana kemiskinan sering kali terkait dengan kondisi keluarga, seperti rendahnya pendidikan dalam keluarga atau total anggota keluarga yang jumlahnya tidak sebanding dengan penghasilan. Keluarga dengan banyak anggota namun dengan pendapatan yang terbatas cenderung mengalami kesulitan ekonomi.
3. Penyebab Sub-Budaya (Subcultural) yaitu kemiskinan bisa terkait dengan budaya atau kebiasaan yang berkembang di dalam lingkungan tertentu. Misalnya, kebiasaan hidup yang tidak mendukung peningkatan ekonomi atau nilai-nilai budaya yang tidak mendorong kerja keras dan pendidikan dapat memperkuat kondisi kemiskinan.
4. Penyebab Agensi yakni kemiskinan dapat disebabkan oleh tindakan atau kebijakan pihak lain, seperti dampak dari perang, kebijakan pemerintah yang tidak adil, atau aktivitas ekonomi yang merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat.

2.1.1.5. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan meresap dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga memiliki efek jauh lebih luas yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Hafidah dalam Sartono (2023) menjelaskan beberapa dampak negatif dari kemiskinan meliputi:

1. Tingginya Angka Kriminalitas. Di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat yang kekurangan sumber daya mungkin merasa terdorong melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam kondisi sebaliknya, di daerah dengan kesejahteraan yang lebih baik, angka kriminalitas cenderung lebih rendah karena akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi lebih baik.
2. Akses Pendidikan Tertutup: Pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun biaya pendidikan sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin. Keterbatasan sumber daya membuat mereka kesulitan untuk membiayai pendidikan, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan. ini membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja, memperburuk kondisi kemiskinan dan menghalangi perbaikan sosial dan ekonomi.
3. Tingkat Pengangguran Tinggi: Kemiskinan yang berkepanjangan sering kali mengakibatkan kualitas sumber daya manusia yang rendah karena keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, individu memiliki kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tingkat pengangguran meningkat. Pengangguran yang tinggi memperparah kemiskinan, menciptakan siklus yang sulit diputus.
4. Angka Kematian Tinggi: Kemiskinan dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan makanan bergizi. Keterbatasan akses ini mengarah pada masalah kesehatan serius, termasuk gizi buruk dan penyakit yang tidak diobati. Hal ini berkontribusi pada tingginya kematian di kalangan masyarakat miskin, karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1. Definisi dan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Indikator utama kesehatan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi cenderung mencerminkan peningkatan dalam ketersediaan lapangan kerja, pendapatan hingga standar hidup. Todaro (2011) mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah proses

peningkatan kapasitas produksi pada suatu perekonomian untuk menaikkan pendapatan nasional. Arsyad dalam Wau et al. (2022) mengatakan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. M Wau juga menuliskan pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno yaitu sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Budiono dalam Chalid (2023) melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Sukarniati et al. (2021) menjelaskan pada dasarnya teori pertumbuhan ekonomi digolongkan dalam dua mazhab yaitu historis dan analitis. Mazhab historis menitikberatkan bahwa proses pembangunan didasarkan pada proses tahapannya. Berbeda dengan mazhab analitis yang menekankan pada teori yang bisa menggambarkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dengan logis dan lebih konsisten. Tokoh yang termasuk mazhab historis seperti Karl Marx dan Rostow. Selain itu, menurut penggolongan lain, teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi lima golongan besar, yakni aliran klasik, Karl Marx, Schumpeter, Neo-klasik, dan Post Keynesian. Adapun tokoh yang termasuk golongan mazhab analitis adalah golongan Klasik dan Neo-klasik. Berikut pandangan masing-masing golongan tersebut:

A. Aliran Historis

Mazhab historis menekankan pentingnya kebijakan yang berfokus secara umum pada perbaikan kondisi masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas tenaga kerja. Mazhab ini dikemukakan oleh:

1. Friedrich List

Menurut List ada lima tahap perkembangan ekonomi suatu masyarakat yaitu pertama tahap berburu, tahap beternak, tahap agraris, kombinasi antara bertani dan insutri manufaktur dan terakhir kombinasi antara bertani, industri manufaktur dan perdagangan.

2. Bruno Hildebrand

Menurut Hildebrand ada tiga tahapan dalam perkembangan ekonomi yaitu Perekonomian barter, uang dan perekonomian kredit.

3. Karl Bucher

Menurut Bucher ada tiga tahapan pada perkembangan ekonomi yakni perekonomian subsisten, perekonomian kota dan perekonomian nasional

4. Walt Whitman Rostow

Rostow mengemukakan bahwa ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tinggal landas, tahap menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

B. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul saat revolusi industri yang menjadi permulaan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi muncul karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemikir mazhab Klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Mazhab Klasik berasumsi bahwa seakan-akan perkembangan ekonomi berjalan dalam keadaan pasar bebas dengan persaingan yang sempurna tanpa adanya unsur monopoli.

1. Adam Smith

Terkenal sebagai "bapak ilmu ekonomi modern", dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", Adam Smith meyakini bahwa setiap orang bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith merupakan penganut paham perdagangan bebas. Menurut mereka, ada tiga unsur pokok aktor produksi yakni sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk dan stok barang modal. Menurut Smith, proses pembangunan terjadi secara kumulatif. Pertumbuhan ekonomi melalui beberapa tahapan yakni masa beternak, bercocok tanam, perdagangan dan industri.

2. David Ricardo

Teori pertumbuhan Klasik mengalami perkembangan signifikan di tangan David Ricardo. Lewat bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*, ia yang memperjelas konsep dan mekanisme proses pertumbuhan

ekonomi. Menurutny ada tiga kelompok dalam perekonomian yaitu tuan tanah, kapitalis dan buruh. Beberapa hal yang menjadi sorotan Ricardo adalah jumlah tanah terbatas, pentingnya pembangunan pertanian, akumulasi modal dan peningkatan keuntungan untuk pemupukan modal. Ricardo juga menekankan pentingnya tabungan, perdagangan luar negeri untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Teori Ricardo secara umum bersifat dinamis sebab melihat pengaruh perubahan berbagai variabel pada pembangunan seperti jumlah penduduk, upah, sewa, dan keuntungan.

3. Thomas Robert Malthus

Malthus meyakini perekonomian terlebih dahulu akan mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Menurut Malthus untuk pembangunan ekonomi harus ada pertumbuhan seimbang antara sektor pertanian dan sistem sektor. Selain itu juga harus ada upaya untuk menaikkan permintaan efektif dengan cara pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara lebih adil. Malthus juga menilai perlu melakukan perluasan perdagangan internal dan eksternal.

4. Arthur Lewis

Teori Lewis menilai pembentukan modal bergantung dengan surplus kapitalis yakni modal terbentuk dari proses laba yang dihasilkan oleh kapitalis. Proses pertumbuhan ekonomi dapat terjadi pada dua sektor yakni sektor tradisional dengan produktivitasnya yang rendah namun sumber tenaga kerja melimpah. Lalu, sektor modern yang memiliki produktivitas tinggi dan juga menjadi sumber akumulasi modal.

5. Karl Marx

Pemikiran Karl Marx menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurutny perkembangan masyarakat melalui lima tahapan yaitu masyarakat komunal primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, kapitalis dan sosialis. Marx menegaskan bahwa masyarakat telah menempuh tahapan yang berbeda-beda dalam sejarah.

C. Neo Klasik (Solow-Swan)

Pelopop teori ini adalah Robert Solow melalui tulisannya dengan judul *A Contribution to the Theory of Economic Growth* tahun 1956. Solow berpasangan dengan Trevor W. Swan yang memiliki tulisan berjudul *Economic Growth and Capital Accumulation*. Solow-Swan bersepakat bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, akumulasi modal, dan pertumbuhan penduduk. Teori pertumbuhan neo-klasik mempunyai beberapa variasi. Seperti pada bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass. Dimana output adalah fungsi dari variabel tenaga kerja dan modal sedangkan variabel kemajuan teknologi merupakan eksogen.

$$\text{Fungsi Cobb-Douglass: } Q_t = T_t K_t^a L_t^b$$

Dimana Q = Tingkat produksi pada tahun t .

T_t = Tingkat teknologi pada tahun t .

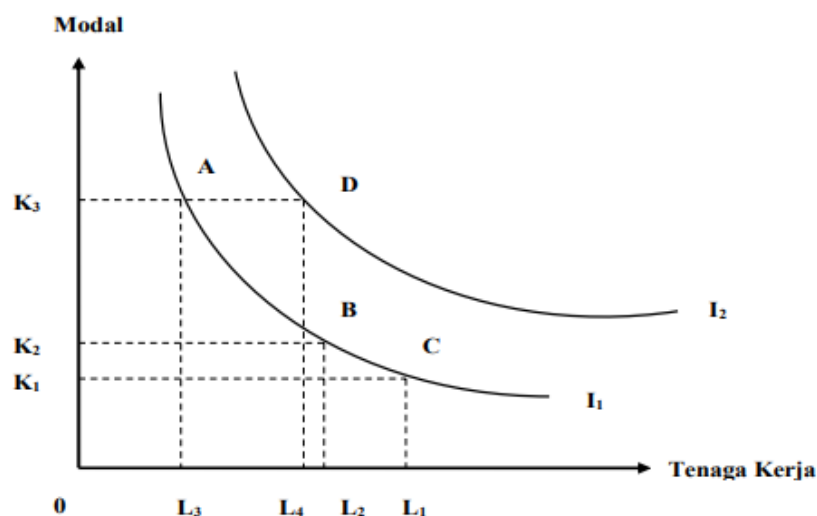
K_t = Jumlah barang modal pada tahun t .

L_t = Jumlah tenaga kerja pada tahun t .

a = Pertambahan output karena pertambahan satu unit modal.

b = Pertambahan output karena pertambahan satu unit tenaga kerja.

Teori pertumbuhan neo-klasik menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan output sebagaimana tergambar dalam kurva berikut ini:



Kurva 1 Fungsi Produksi Neo Klasik

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menghasilkan output senilai I_1 , kombinasi variabel modal dan variabel tenaga kerja yang dapat dipakai adalah antara K_3 dan L_3 . Lalu K_2 dan L_2 juga K_1 dan L_1 . Meski terjadi perubahan pada jumlah modal, tetapi terdapat kemungkinan tingkat output bisa tidak berubah. Sebaliknya tingkat output dapat mengalami perubahan, meski jumlah modal yang digunakan konstan. Diasumsikan jumlah modal tidak mengalami perubahan sebesar K_3 , tetapi jumlah output dapat diperbesar dari I_1 menjadi I_2 , apabila tenaga kerja yang digunakan bertambah dari L_3 menjadi L_4 .

Perkembangan ekonomi menurut teori neo-klasik melalui beberapa tahap yaitu pertama negara meminjam kapital (debitur belum mapan) lalu menghasilkan dengan pinjaman itu. Pada tingkat ini, pokok pinjaman kapital belum dibayar atau hanya membayar dividen dan bunga. Setelah penghasilan meningkat barulah sebagian digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Negara menjadi debitur yang sudah mapan (*mature debitur*). Tahap selanjutnya, negara menerima bunga dan dividen lebih besar sehingga hutangnya semakin sedikit dan piutangnya semakin besar. Negara berada pada tingkatan kreditur yang belum mapan (*immature creditor*). Terakhir, negara hanya menerima deviden dan bunga dari negara lain sehingga menjadi kreditur yang sudah mapan (*mature creditor*).

D. Teori Ketergantungan Schumpeter

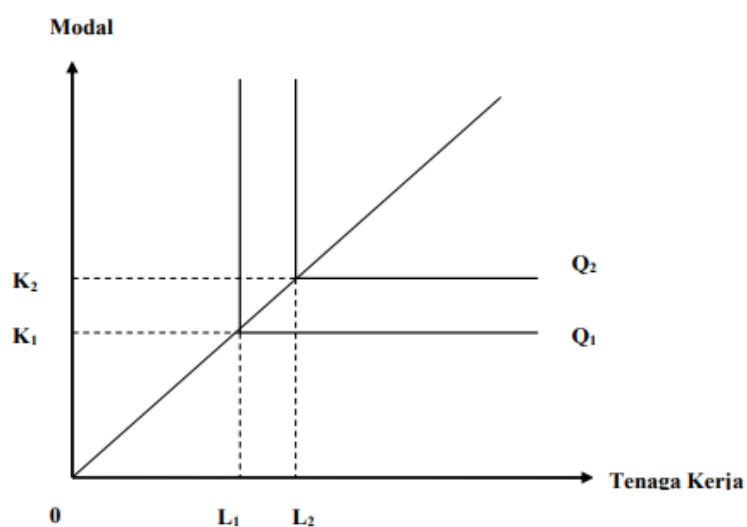
Teori Schumpeter sebenarnya masuk kelompok klasik namun banyak yang menyimpulkan bahwa teori ini lebih dekat dengan para ekonom modern. Schumpeter tidak hanya melihat aspek pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumber daya alam tetapi juga melihat pentingnya keberadaan inovasi dan wiraswasta. Schumpeter juga membedakan pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi timbul karena faktor yang bersifat rutin, seperti pertumbuhan penduduk dan kapital sedangkan perkembangan ekonomi merupakan kenaikan output karena inovasi. Perkembangan ekonomi menurutnya bermula dari lingkungan sosial dan politik serta karena adanya teknologi yang bisa menunjang kreativitas wiraswasta dimana penerapan inovasi akan memberikan keuntungan diatas normal.

Selain itu Schumpeter juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi melalui jalur kapitalisme akan membawa kemakmuran bagi rakyat banyak, tanpa perlu campur tangan dari pemerintah. Menurutnya pemerintah cukup menyediakan lingkungan yang menunjang inovasi sedangkan sistem ekonomi itu sendiri yang akan membawa kemakmuran.

E. Keynesian (Harrod-Domar)

Teori ini diperkenalkan oleh Sir Roy F. Harrod (1900-1978) dan Evsey Domar (1914-1997) berdasarkan pengalaman negara maju. Sebenarnya, Teori Harrod-Domar, terinspirasi oleh Keynes. Bedanya, teori Harrod-Domar dominan mengungkapkan teori-teori yang menganalisis syarat berkembangnya suatu perekonomian dalam jangka panjang yang dianggap masih kurang dibahas oleh Keynes. Teori ini menegaskan peran investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Sependapat dengan Keynes, Harrod-Domar menilai pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas produksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Meskipun kapasitas produksi bertambah, namun pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta jika pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan dibanding dengan masa sebelumnya. Berikut Fungsi Produksi menurut Harrod Domar:



Kurva 2 Fungsi Produksi Harrod-Domar

Pada kurva tergambar, fungsi produksi berbentuk L dikarenakan sejumlah modal hanya dapat menghasilkan suatu tingkat output yang tertentu, yaitu tergantung pada modal dan juga tenaga kerja yang dipergunakan. Apabila menginginkan hasil output sebesar Q1, maka modal dan juga tenaga kerja yang digunakan adalah sebesar K1 dan L1. Jika ingin menambah output sebesar Q2, maka digunakan kombinasi modal sebesar K2 dan tenaga kerja sebesar L2. Jika rasio modal output (capital output ratio) adalah k dan s adalah rasio tabungan nasional, maka national saving ratio yang merupakan persentase dari output nasional yang ditabung dan bahwa jumlah investasi baru ditentukan oleh jumlah tabungan total S. Dengan demikian, model pertumbuhan ekonominya menjadi:

1. Jika s adalah MPC, maka $S = s Y$
2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga $I = \Delta K$

Namun, karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output Y, seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal output k, maka

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \text{ atau } \Delta K = k \Delta Y$$

3. Mengingat jumlah total tabungan nasional (S) mesti sama dengan total investasi (I), maka $S = I$

Karena $S = s Y$ dan $I = \Delta K = k \Delta Y$ maka $S = s Y = k \Delta Y = \Delta K = I$ Atau diringkas $s Y = k \Delta Y$

Selanjutnya maka akan diperoleh persamaan:

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{s}{k} = \text{pertumbuhan ekonomi}$$

Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan rasio tabungan. Artinya semakin banyak GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, ini berbanding terbalik dengan rasio modal output dimana jika semakin besar rasio modal output nasional atau k, maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah.

F. Teori Pertumbuhan Endogen.

Teori ini oleh Romer (1994) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam “*endogenous*” sistem ekonomi itu sendiri. Menurutnya, kemajuan teknologi bersifat endogen yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan keputusan pelaku ekonomi di bidang ilmu pengetahuan. Elemen dasar teori pertumbuhan endogen yaitu pertama perubahan teknologi melalui akumulasi ilmu pengetahuan. Kedua, kehadiran ide baru oleh perusahaan dan ketiga produksi barang konsumsi dari faktor produksi ilmu pengetahuan dinilai bisa tumbuh tanpa batas. Fungsi Teori Pertumbuhan Endogen adalah:

$$Y = f(R, K, H)$$

Dimana: Y = total *output*

R = penelitian atau pengembangan oleh perusahaan

K = akumulasi modal fisik

H = akumulasi modal insani

2.1.2.2. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan jumlah total output nilai barang maupun jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Mengutip penjelasan Bank Indonesia dalam Dwp et al., 2020 ada tiga pendekatan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi PDRB menggambarkan total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Unit-unit produksi ini dikelompokkan dalam sembilan sektor, yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, serta (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan produksi adalah:

$$Y = \text{NTB sektor 1} + \text{NTB sektor 2} + \dots + \text{NTB sektor 9}$$

Keterangan :

NTB= Nilai Tambah Bruto

2. Pendekatan Pengeluaran

PDB dengan pendekatan pengeluaran terdiri atas pertama pengeluaran pada rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Kedua pengeluaran pemerintah. Ketiga pembentukan modal tetap bruto. Keempat perubahan inventori serta kelima ekspor neto (yaitu ekspor yang telah dikurangi impor). Penghitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = C + G + I + NX \text{ (X-M)}$$

Keterangan:

C = konsumsi rumah tangga/swasta

G = belanja/pengeluaran pemerintah

I = investasi

NX = ekspor netto

X = ekspor

M = impor

3. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan pendapatan PDB dihitung dari total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi di suatu daerah selama periode tertentu (satu tahun). Balas jasa ini seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan adalah:

$$Y = W + R + I + P$$

Keterangan:

W = upah (*wage*)

R = sewa (*rent*)

I = bunga modal (*interest*)

P = keuntungan (*profit*)

Untuk perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi, ada beberapa metode yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Metode Sederhana

Cara paling sederhana untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah dengan metode sederhana. Namun metode ini memiliki kelemahan karena hanya dapat menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan (satu tahun). Formulasi untuk metode ini adalah sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

r = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

PDB_t = PDB pada tahun t

PDB_{t-1} = PDB pada tahun sebelumnya

untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dalam periode yang lebih panjang (misalnya, selama tiga tahun), tingkat pertumbuhan per tahun harus dihitung terlebih dahulu dan kemudian baru dirata-ratakan.

$$r = \frac{r(t-1, t) + (t, t+1) + r(t+1, t+2)}{3}$$

2. Metode End to End

Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada metode sederhana digunakan metode End to End dengan rumus:

$$r = \sqrt[n]{\frac{PDB_t}{PDB_{t-1}}} - 1 \times 100\%$$

Dimana r = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

PDB_t = PDB pada tahun t

PDB_{t-1} = PDB pada tahun sebelumnya.

3. Metode Regresi

Metode perhitungan pertumbuhan dengan metode regresi hadir memadukan nilai PDB diantara awal hingga akhir periode penelitian atau observasi. Penghitungan pertumbuhan ekonomi dengan metode ini berbentuk model semi-log berikut ini:

$$\ln PDB = A + rt$$

Dimana:

$$\ln PDB = \text{Semi Log PDB}$$

A = Average (Rata-rata pertumbuhan ekonomi pertahun)

rt = Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun t

2.1.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor. Amalia et al. (2022) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kualitas ini diukur dari keahlian, pengetahuan, kreativitas, serta pendidikan dan pelatihan. Produk negara akan berkualitas tinggi jika tenaga kerjanya terampil. Sebaliknya, kurangnya tenaga kerja yang terampil akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2. Sumber Daya Alam

Selain sumber daya manusia, hal lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini berkaitan erat dengan iklim dan lingkungannya. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dibandingkan negara-negara yang memiliki sumber daya alam terbatas.

3. Pembentukan Modal

Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia harus dibarengan dengan ketersediaan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh aset modal yang berkontribusi pada pembentukan modal dalam perekonomian seperti bangunan, mesin, dan sarana transportasi. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan memperbaiki rasio modal terhadap tenaga kerja dalam kelompok tertentu. Hal inilah yang berpotensi untuk meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

4. Pengembangan Teknologi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga harus didukung oleh pengembangan teknologi. Jika sumber daya terbatas maka kemajuan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Negara atau daerah yang menggunakan teknologi akan berkembang lebih pesat dibandingkan dengan negara yang belum menggunakan teknologi.

5. Faktor Sosial dan Politik

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi faktor budaya, seperti adat istiadat, tradisi, nilai, dan kepercayaan. Selain itu, iklim politik suatu negara juga berdampak pada pertumbuhan ekonominya. Stabilitas politik dapat meningkatkan output atau produktivitas masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi

2.1.3. Inflasi

Secara umum inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus pada periode tertentu. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan masyarakat serta gangguan pada distribusi barang. Inflasi merupakan sebuah proses dimana harga-harga dalam perekonomian mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar.

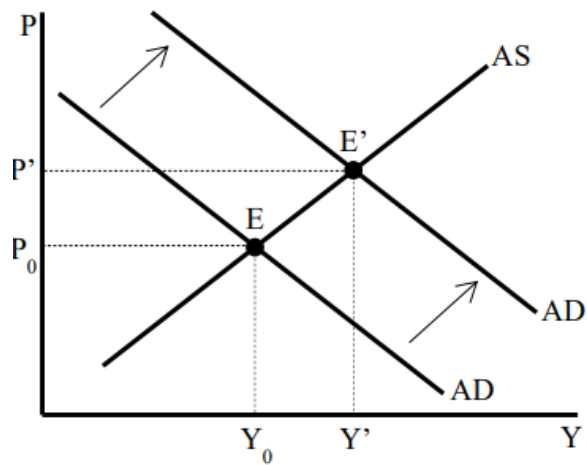
Inflasi yang terjaga dapat menciptakan stabilitas dan memberi dampak positif bagi perekonomian. Inflasi dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, penyebab dan asalnya. Pujadi (2022) membedakan inflasi berdasarkan :

1. Inflasi berdasarkan besarnya:
 - a. inflasi ringan yaitu inflasi yang kurang dari 10% setahun
 - b. inflasi sedang yaitu tingkat inflasi antara 10% sampai 30% setahun
 - c. inflasi berat yaitu besaran inflasi antara 30% sampai 100% setahun
 - d. hiperinflasi yaitu inflasi lebih dari 100% setahun
2. Inflasi berdasarkan sumbernya:
 - a. inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam negeri, seperti pembiayaan defisit anggaran pemerintah dengan mencetak uang baru, gagal panen, atau faktor lain yang bersumber dari dalam negeri disebut *domestic inflation* (inflasi domestik),

b. inflasi yang berasal dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Inflasi ini menyebar ketika terjadi kenaikan harga barang atau jasa impor disebut *importes inflation* (inflasi yang diimpor).

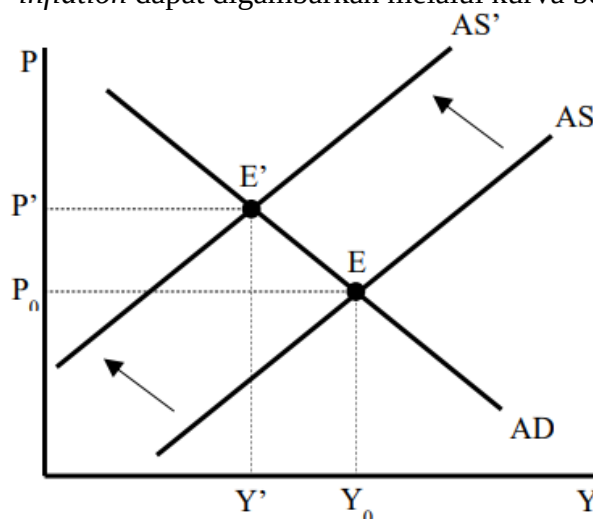
3. Inflasi berdasarkan penyebabnya:

a. *Demand-pull inflation* atau inflasi permintaan yaitu inflasi yang terjadi akibat peningkatan permintaan agregat. *Demand pull inflation* dapat digambarkan melalui kurva berikut ini:



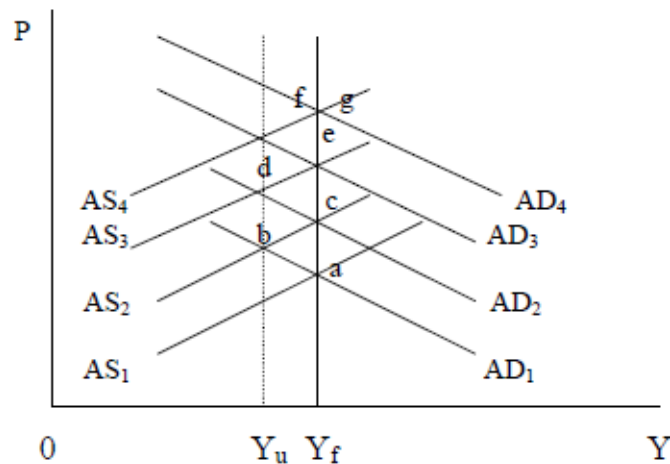
Kurva 3. Demand pull inflation

b. *Cost-push inflation* atau inflasi biaya yaitu inflasi yang dipicu karena adanya penurunan penawaran agregat atau sisi peningkatan biaya produksi seperti peningkatan harga komoditas, bencana alam, depresiasi nilai tukar, dan dampak inflasi luar negeri. *Cost-push inflation* dapat digambarkan melalui kurva berikut ini:



Kurva 4. Cost-Push inflation

- c. Selain Demand-pull inflation dan cost-push inflation, (Sutawijaya, 2012) menambahkan mixed inflation atau inflasi campuran yaitu inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan dan penurunan penawaran yang terjadi secara sendiri-sendiri. Inflasi ini dapat digambarkan melalui kurva berikut:



Kurva 5. Mixed inflation

2.1.3.1. Indikator Inflasi

Dalam menggambarkan terjadinya inflasi, ahli ekonomi menggunakan beberapa indikator, diantaranya:

1. PDB Deflator

PDB Deflator (indeks implisit) yaitu indeks yang menggambarkan perkembangan harga ditingkat produsen (*producer price indeks*) dengan rumus:

$$PDB\ Deflator = \frac{PDB\ atas\ dasar\ harga\ berlaku}{PDB\ atas\ dasar\ harga\ konstan\ (2010=100)} \times 100\%$$

Laju inflasi tingkat produsen dapat diturunkan dari PDB Deflator yaitu:

$$I_{Produsen} = \left(\frac{PDB\ Deflator_t}{PDB\ Deflator_{t-1}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

$I_{produsen, t}$ = Inflasi ditingkat produsen pada waktu t

$PDB\ Deflator_t$ = PDB Deflator pada waktu t

$PDB\ Deflator_{t-1}$ = PDB Deflator pada waktu $t-1$

Cakupan PDB Deflator yakni:

1. Barang dan jasa yang dibeli pemerintah atau perusahaan, dimana barang dan jasa tersebut digunakan untuk produksi.
2. Penimbang PDB Deflator adalah kuantum dari kelompok komoditi barang dan jasa pada tahun berjalan.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) mencerminkan perubahan harga di tingkat grosir atau perdagangan besar untuk komoditas yang diperdagangkan pada suatu negara atau daerah. Komoditas ini meliputi produk dalam negeri yang dipasarkan secara lokal maupun diekspor, serta barang impor. Terdapat total 314 jenis komoditas yang tercakup, yang diklasifikasikan dalam tiga sektor dan dua kelompok barang yaitu pertama sektor pertanian, kedua sektor pertambangan dan penggalan, ketiga sektor industri. Selanjutnya kelompok barang impor dan ekspor. IHPB dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Menurut komponen penyediaan/ penawaran barang atau menurut sektor/kelompok barang
- b. Menurut penggunaan barang
- c. Menurut kelompok barang dalam proses produksi

IHPB dapat digunakan sebagai deflator PDB untuk perkembangan ekonomi. Selain itu IHPB bermanfaat untuk perusahaan konstruksi atau bangunan yang memperoleh tender proyek dari pemerintah untuk proses pembangunan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun sebagai bahan eskalasi harga. Adapun rumus penghitungan IHPB menggunakan formula *Laspeyres* yang dikembangkan:

$$I_n = \frac{\sum P_n x P_{n-1} Q_o}{\sum P_o Q_o}$$

Dimana:

I_n : Indeks bulan ke n (bulan penelitian)

P_n : Harga bulan ke n (bulan penelitian)

P_{n-1} : Harga bulan ke n-1 (bulan selanjutnya)

$P_{n-1} Q_o$: Nilai timbangan bulan n-1 (bulan sebelumnya)

$P_o Q_o$: Nilai timbangan tahun dasar 2000

Dari IHPB dapat diturunkan laju inflasi di tingkat perdagangan besar/grosir yaitu:

$$I_{\text{grosir},t} = \left(\frac{IHPB_t}{IHPB_{t-1}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

$I_{\text{grosir},t}$: inflasi ditingkat perdagangan besar (grosir) pada waktu t

$IHPB_t$: IHPB pada waktu t

$IHPB_{t-1}$: IHPB pada waktu t-1

3. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau penduduk dari waktu ke waktu. Komponen IHK meliputi barang-barang pokok dan jasa yang biasa digunakan oleh masyarakat, seperti makanan, pakaian, perumahan, transportasi, serta pendidikan. BPS menggunakan IHK untuk memahami tingkat daya beli masyarakat. Ketika IHK naik, berarti terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum yang bisa mengurangi daya beli, sehingga inflasi sedang terjadi. Sebaliknya, jika IHK tetap atau turun, maka hal itu menunjukkan stabilitas harga atau deflasi. IHK juga digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian upah dan kebijakan ekonomi lainnya karena memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana harga-harga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejak Juni 2008, IHK mencakup 284-441 komoditas yang dihitung berdasarkan dengan pola konsumsi hasil SBH atau Survei Biaya Hidup di 66 kota pada tahun 2007.

Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah rumus Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*), yaitu:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \cdot P_{(n-1)i} \cdot Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} \cdot Q_{oi}}$$

Dimana:

IHK_n : IHK periode ke (n-1)

P_{ni} : harga barang i, periode ke-n

- $P_{(n-1)i}$: harga barang i, periode ke n-1
 $P_{(n-1)i} \cdot Q_{oi}$: nilai konsumsi barang i, periode ke-n
 $P_{oi} Q_{oi}$: nilai konsumsi barang i dengan tahun dasar 2000
 K : jumlah barang komoditas

Laju inflasi ditingkat konsumen dapat diturunkan dari IHK menjadi:

$$I_{\text{konsumen},t} = \left(\frac{IHK_t}{IHK_{t-1}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

- $I_{\text{konsumen},t}$: inflasi ditingkat konsumen pada waktu t
 IHK_t : IHK pada waktu t
 IHK_{t-1} : IHK pada waktu t-1

2.1.3.2. Teori Inflasi

Ada tiga teori mengenai inflasi yaitu Teori Kuantitas, Teori Keynes dan Teori Strukturalis. Masing-masing teori menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi.

1. Teori Kuantitas

Teori ini merupakan teori tertua yang membahas inflasi. Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar meningkat bukan disebabkan oleh faktor lain. Dalam teori ini ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi yaitu jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat. Teori kuantitas inflasi, yang berakar pada karya-karya ekonom klasik seperti Irving Fisher, berfokus pada peran penting kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Salah satu implikasi penting dari teori ini adalah bahwa bank sentral perlu mengendalikan jumlah uang beredar untuk mencegah inflasi. Jika pasokan uang meningkat tanpa disertai peningkatan dalam produksi, maka daya beli uang akan menurun, sehingga harga barang-barang akan mengalami kenaikan.

2. Teori Keynes

Teori John Maynard Keynes berpendapat bahwa inflasi sering terjadi akibat peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi. Ketika pengeluaran masyarakat—baik dalam bentuk konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah—meningkat, tetapi pasokan barang dan jasa tidak dapat

memenuhi permintaan tersebut, harga-harga akan naik. Dalam pandangan Keynes, ekspektasi inflasi juga memainkan peran penting, di mana harapan masyarakat mengenai inflasi di masa depan dapat mendorong mereka untuk meningkatkan pengeluaran saat ini, yang pada gilirannya memperburuk inflasi.

3. Teori Strukturalis

Menurut teori strukturalis, inflasi adalah hasil dari ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian. Teori ini mengatakan inflasi tidak hanya disebabkan oleh permintaan yang berlebihan (seperti dalam teori Keynesian) atau peningkatan jumlah uang beredar (seperti dalam teori kuantitas uang), tetapi juga oleh struktur ekonomi. Menurut teori ini ada dua penyebab kekakuan utama dalam perekonomian negara yang dapat menimbulkan inflasi yaitu infleksibilitas suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Di samping itu, inflasi strukturalis juga memperhatikan peran kebijakan pemerintah, regulasi, dan kondisi sosial yang dapat memperburuk atau memperbaiki situasi inflasi. Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi struktural untuk mengatasi penyebab inflasi yang mendasar, seperti memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi persaingan yang sehat di pasar. Dengan demikian, untuk mengatasi inflasi yang bersifat struktural, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk perubahan dalam kebijakan ekonomi dan struktur pasar.

2.1.4. Upah Minimum

Upah Minimum adalah besaran upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (Perpres RI No. 51 2023)

Provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki upah minimum melakukan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun. Penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (α).

Indeks tertentu ini merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Formula penghitungan upah minimum adalah sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)}$$

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)} = \{\text{Inflasi} + (PE \times \alpha)\} \times UM_{(t)}$$

Simbol α merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol). Simbol α ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja; dan rata-rata atau median upah. Selain juga mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan. Dalam hal nilai upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten/kota, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan ketentuan:

$$\text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)} = PE \times \alpha \times UM_{(t)}$$

Simbol α merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol). Simbol α ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Selain itu mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi (UMP). Penetapan UMK dilakukan bila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Penetapan UMK yang belum memiliki Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu, yaitu:

- a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Penghitungan UMK menggunakan formula penghitungan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja; dan median upah. Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama. Penghitungan UMK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio paritas daya beli dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F1)} = \frac{PPP \text{ Kab/Kota}}{PPP \text{ Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

- b. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F2)} = \frac{(1 - TPT \text{ Kab/Kota})}{(1 - TPT \text{ Provinsi})} \times UMP_{(t)}$$

- c. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio median upah, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F3)} = \frac{\text{Median Upah Kab/Kota}}{\text{Median Upah Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

- d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(t+1)} = \frac{UMK_{(f1)} + UMK_{(f2)} + UMK_{(f3)}}{3}$$

2.1.4.1. Teori Upah

1. Karl Marx

Karl Marx berfokus pada hubungan antara upah, tenaga kerja, dan kapitalisme. Dalam pandangan Marx, upah bukan hanya sekadar imbalan atas kerja, tetapi juga mencerminkan hubungan eksploitasi antara buruh dan pemilik modal.

Menurut Marx, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, namun dalam sistem kapitalis, pekerja hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang mereka hasilkan. Selisih antara nilai produk yang dihasilkan pekerja dan upah yang mereka terima disebut sebagai nilai lebih (surplus value), yang menjadi sumber keuntungan bagi pemilik modal.

2. David Ricardo

Menurut teori ini, upah dipandang sebagai biaya hidup yang diperlukan bagi pekerja atau buruh untuk mempertahankan kehidupan dan mengisi kebutuhan dasar mereka. Ricardo berargumen bahwa upah cenderung bergerak menuju tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan pekerja, suatu konsep yang dikenal sebagai teori upah minimum. Ricardo menegaskan kepada buruh bahwa uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian yang memang yang dimampu oleh majikannya atau dikenal teori upah wajar (alami).

3. Lassalle

Ferdinand Lassalle, seorang pemikir sosial dan ekonom Jerman, memiliki pandangan khusus mengenai upah yang berfokus pada konsep keadilan dan hak pekerja. Teori ini dikenal dengan istilah teori upah besi dimana kaum buruh merasa diposisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh produsen. Hal inilah yang mendasari Lassalle menganjurkan pembentukan serikat pekerja untuk menghadapi kebijakan para produsen.

4. John Stuart Mill

John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom klasik, memiliki pandangan yang komprehensif mengenai upah yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Teori ini juga dikenal dengan teori dana upah. Menurut Mill, upah ditentukan oleh kondisi pasar tenaga kerja, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah atau jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Namun pertumbuhan penduduk akan mendorong upah turun karena jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja tidak sebanding.

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan pembangunan suatu negara atau wilayah berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. (Suharto, 2020)

Menurut BPS, IPM adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada 1990, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia dan sumber daya mereka dalam proses pembangunan. Mengutip dari RB Suharto, Teori Indeks Pembangunan Manusia Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Andrietya (2020) mengatakan penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan memperluas kebebasan memilih. Kedua, memanfaatkan beberapa indikator untuk menjaga kesederhanaan ukuran. Ketiga, membentuk indeks komposit daripada menggunakan berbagai indeks dasar dan menciptakan suatu indeks yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Adapun rumus yang dipakai dalam penghitungan IPM adalah:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Keterangan: X_1 = lamanya hidup

X_2 = tingkat indeks pendidikan

X_3 = tingkat layak hidup

Namun sebelum melakukan penghitungan IPM, setiap komponen indeks harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu dengan rumus:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{X_{(i,j)} - X_{(i-\min)}}{X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)}}$$

Dimana : $X_{(i,j)}$ = Indikator ke i daerah j

$X_{(i-\min)}$ = nilai minimum X_i

$X_{(i-\max)}$ = nilai maksimum X_i

Menurut Badan Pusat Statistik Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah maka hal ini menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1. Rendah: $IPM < 60$
2. Sedang: $60 \leq IPM < 70$
3. Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
4. Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Tabel 2. Nilai Pada Komponen IPM

Indikator IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
AHH (Angka Harapan Hidup)	25	85
AMH (Angka Melek Huruf)	0	100
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	0	100
PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)	360.000	737.720

2.1.5.1. Elemen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikenal sebagai Human Development Index ([Azfirmawarman et al., 2023](#)). HDI jadi standar yang diformulasikan secara konsisten untuk mengembangkan potensi manusia. Kriteria pengukuran HDI yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup (AHH) mengukur perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai seseorang. AHH menggunakan metode tak langsung (Indirect Estimation) dengan data yang diperoleh dari perhitungan Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). UNDP menggunakan standar untuk memperkirakan nilai maksimal dan minimal usia yang mungkin dicapai, dengan batas atas 85 tahun dan bawah 25 tahun.

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimana: I : Indeks Komponen
 AHH : Angka Harapan Hidup
 AHHmin : Angka Harapan Hidup Terendah
 AHHmaks : Angka Harapan Hidup Tertinggi

2. Indeks Pendidikan diukur dengan menggunakan rata-rata tahun bersekolah, Harapan Lama Sekolah atau tingkat melek huruf. Indikator ini menunjukkan tingkat kemahiran seseorang dalam membaca dan menulis (Lit), dengan MYS menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diikuti oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Beberapa negara menetapkan dua batas untuk menghitung masa bersekolah, dengan usia maksimal 15 tahun dan minimal nol tahun. Persentase penduduk yang dianggap melek huruf, yaitu yang bisa membaca dan menulis aksara Latin atau lainnya, dihitung untuk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf ini berkisar antara 0 hingga 100, di mana 100 menunjukkan semua penduduk mahir membaca dan menulis, sedangkan 0 menunjukkan sebaliknya dengan rumus:

$$IHLS = \frac{HLS - HLSmin}{HLSmaks - HLSmin}$$

Dimana:

I : Indeks Komponen
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 HLSmin : Harapan Lama Sekolah Terendah
 HLSmaks : Harapan Lama Sekolah Tertinggi

3. Indeks Standar Hidup Layak mengukur kualitas hidup seseorang berdasarkan standar kehidupan yang layak, yang mencerminkan tingkat kemakmuran yang diperoleh dari perkembangan ekonomi. BPS menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita sesuai dengan metode Atkinson untuk menentukan kualitas hidup, sementara UNDP menggunakan produk domestik bruto (PDB) riil.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaranmin})}{\ln(\text{pengeluaranmaks}) - \ln(\text{pengeluaranmin})}$$

Dimana:

Ipengeluaran	: Indeks Komponen Pengeluaran
In	: Indeks komponen
Pengeluaran min	: Pengeluaran Terendah
Pengeluaran maks	: Pengeluaran Tertinggi

2.1.5.2. Metode Baru Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

UNDP telah memperkenalkan metode baru untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbeda secara fundamental dari metode sebelumnya. Ada dua faktor utama yang mendorong perubahan ini: perspektif indikator dan perhitungan indeks. Dalam metode terkini, UNDP memperkenalkan parameter baru, yaitu perkiraan lama bersekolah, yang menggantikan parameter Anak Masih Hidup (AMH) karena pencapaian AMH yang tinggi di banyak negara. Selain itu, UNDP juga mengganti indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan parameter yang lebih sesuai.

Metode baru ini juga menggunakan teknik penghitungan indeks yang berbeda, yaitu menggunakan mean geometrik dalam perhitungan indeks keseluruhan. Berbeda dengan mean aritmatika yang dapat menyembunyikan ketidaksesuaian, mean geometrik memerlukan konsistensi dalam semua aspek IPM untuk mencapai nilai maksimal. Di Indonesia, penerapan metode baru ini dilakukan dengan memperbaiki kekurangan metode sebelumnya, sehingga perlu adanya pemutakhiran perhitungan untuk memenuhi standar internasional. Sejak tahun 2014, Indonesia secara resmi mulai menghitung IPM menggunakan metode baru.

Jenis data yang digunakan di Indonesia dalam metode baru ini meliputi:

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk).
2. Perkiraan lama bersekolah dan rata-rata masa sekolah (SUSENAS 2015).
3. PDB per kapita di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang disajikan melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data SUSENAS tahun 2015.

Dalam metode baru ini, beberapa perubahan terjadi pada bagian GNP per kapita karena keterbatasan data. Tiga dari empat parameter yang digunakan untuk menghitung HDI dengan teknik baru ini sangat mirip dengan standar UNDP,

terutama dalam hal PDB per kapita yang mendekati pengeluaran per kapita. Berikut perbedaan indikator metode lama dan baru UNDP: (Azfirmawarman et al., 2023)

Tabel 3. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Kesehatan Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB Per-Kapita	Pengeluaran PerKapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3}(I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$	Rata-rata Geometrik $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$

2.1.6. Penduduk

Badan Pusat Statistik mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan jumlah penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu tempat sedangkan pertumbuhan penduduk adalah jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan migrasi penduduk. (Suharto, 2020)

Pertumbuhan penduduk penting untuk menjadi perhatian karena berdampak pada banyak aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk merujuk pada rata-rata peningkatan jumlah penduduk per tahun antara dua sensus. Laju pertumbuhan penduduk model geometric menggambarkan pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga berbunga (bunga majemuk) yang mana angka pertumbuhan penduduk adalah sama setiap tahunnya. (Alma et al., 2019)

Laju pertumbuhan penduduk dihitung dengan rumus:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Dimana:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun awal

r = laju pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antar tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Apabila nilai $r > 0$, berarti terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Namun bila nilai $r < 0$, berarti pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Sedangkan apabila $r = 0$, berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Selain Geometric, ada laju pertumbuhan penduduk model eksponensial. Metode ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang tetap. Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk menggunakan model ini, dapat digunakan rumus:

$$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_0} \right)$$

Dimana: P_t = jumlah penduduk tahun t

P_0 = jumlah penduduk di tahun awal (dasar)

r = angka pertumbuhan penduduk

n & t = periode waktu dalam tahun

e = bilangan pokok dari sistem logaritma natural dengan nilai 2,7182818

Apabila nilai $r > 0$, berarti terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Namun bila besar nilai $r < 0$, berarti pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Sedangkan apabila $r = 0$, berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

2.1.6.1. Teori-teori Kependudukan

1. Thomas Robert Malthus

Malthus adalah orang pertama yang menyampaikan teori mengenai populasi. Dalam karyanya yang berjudul "Essay on Population," Malthus berpendapat bahwa makanan adalah kebutuhan vital untuk bertahan hidup, keinginan manusia tidak bisa sepenuhnya dikendalikan, dan laju pertumbuhan

penduduk jauh lebih cepat dibandingkan dengan bahan makanan. Menurut teori Malthus, pertumbuhan populasi mengikuti pola deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti pola deret hitung. Dalam situasi di mana terjadi ledakan populasi di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, maka hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan.(Conway, 2015)

Teori Malthus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi yang mengikuti deret ukur dan persediaan pangan yang mengikuti deret hitung. Sebenarnya, teori ini telah mengangkat isu tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai bagian dari lingkungan alam tidak dapat terus-menerus menghasilkan hasil pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Daya dukung tanah menurun karena semakin banyaknya jumlah manusia yang bergantung padanya. Oleh karena itu, jumlah penduduk harus disesuaikan dengan batas kemampuan lingkungan agar tidak membebani atau merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang bisa berujung pada bencana alam seperti banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian.

2. Karl & F. Angel (Marxist)

Aliran Marxist menolak pandangan Malthus yang menyatakan bahwa tanpa pembatasan, penduduk akan menghadapi kekurangan pangan. Menurut pandangan Marxist, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah terhadap persediaan makanan, melainkan terhadap kesempatan kerja, seperti di negara-negara kapitalis. Marxist berpendapat semakin besar populasi, semakin tinggi pula jumlah produk yang dihasilkan, sehingga tidak diperlukan pembatasan penduduk. Pendukung teori Malthus biasanya adalah negara-negara dengan ekonomi kapitalis, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada. Sebaliknya, negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara dengan ekonomi sosialis, seperti negara-negara di Eropa Timur, Tiongkok, Korea, Rusia, dan Vietnam.

Pandangan Marxist didasarkan pada keyakinan bahwa manusia, sepanjang sejarah, selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perbedaan utama antara pandangan Marxist dan Malthus terletak pada pandangan mereka tentang "Sumber Daya Alam." Menurut Malthus, sumber daya alam tidak dapat

berkembang atau mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, Marxist berpendapat bahwa tekanan yang dialami suatu negara bukanlah akibat populasi yang melebihi ketersediaan pangan, melainkan akibat keterbatasan kesempatan kerja, terutama di negara kapitalis. Marxist juga percaya bahwa semakin banyak populasi, semakin tinggi pula produksi yang dihasilkan, sehingga tidak diperlukan pembatasan jumlah penduduk.

3. Garreth Hardin & Paul Ehrlich (NEO-MALTHUSIAN)

Pada abad ke-20, teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok yang mendukung pandangan Malthus ini lebih radikal, dan mereka sangat menganjurkan pengurangan jumlah penduduk melalui metode "Preventive Check," yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, foto-foto yang diambil dari ruang angkasa menunjukkan Bumi seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan makanan yang terbatas. Pada suatu titik, kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan makanan, yang akhirnya akan membawa bencana bagi kapal tersebut. Pada tahun 1971, Ehrlich menulis buku berjudul "The Population Bomb," yang kemudian direvisi menjadi "The Population Explosion." Buku ini mengemukakan beberapa poin penting, yaitu:

- a. Jumlah manusia di Bumi sudah terlalu banyak.
- b. Ketersediaan bahan makanan sangat terbatas.
- c. Kerusakan lingkungan semakin parah akibat peningkatan populasi

Analisis ini diperkuat oleh Meadow pada tahun 1972 melalui bukunya "The Limits to Growth," di mana ia mengaitkan variabel lingkungan seperti populasi, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan polusi. Meskipun demikian, Meadow berpendapat bahwa malapetaka lingkungan tidak dapat dihindari; manusia hanya bisa menunggu dan berusaha membatasi pertumbuhan sambil mengelola alam dengan lebih baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya datang dari para sosiolog yang menyoroti ketidakadanya variabel sosial-budaya dalam penelitiannya. Mesarovic dan Pestel pada tahun 1974 merevisi gagasan Meadow dengan menambahkan hubungan lingkungan antar kawasan.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Secara umum, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, tetapi hubungan ini bersifat kompleks dan tidak selalu linier. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, sebagaimana yang diungkapkan Bourguignon dan Son Kakwani dalam Soelistyo (2023) bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan sebagai fungsi menurun dari tingkat ketidakmerataan. Maka perlu campur tangan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kemiskinan karena dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jika pertumbuhan ekonomi terjadi secara inklusif, dimana manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pengentasan kemiskinan akan lebih efektif. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu atau jika kesenjangan pendapatan semakin melebar, maka manfaat pertumbuhan ekonomi bisa jadi tidak menyentuh masyarakat miskin.

Seperti pada penelitian Halim Najib Putri et al. (2023) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota dan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 – 2021. Sementara itu hasil berbeda terjadi pada penelitian oleh Alisha & Yulhendri (2021). Dimana penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Sumatera Barat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan diikuti dengan pengurangan kemiskinan 0.129547 persen di kabupaten/ kota Sumatera Barat.

2.2.2. Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan

Inflasi dan peningkatan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Secara sederhana inflasi dapat meningkatkan kemiskinan melalui mekanisme penurunan daya beli masyarakat, kenaikan biaya produksi, ketidakstabilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan.

Peningkatan harga yang tidak terduga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat berdampak lebih buruk pada populasi yang rentan, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Mankiw mengatakan kenaikan inflasi juga akan menaikkan garis kemiskinan yang akan mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin bila tidak diikuti dengan peningkatan daya beli atau pendapatan masyarakat.

Penelitian Ronald Banito (2022) mengenai Determinan Kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2022 membuktikan variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0,100, nilai t-statistik 2,124 dan probabilitas 0,05 ($< 0,05$). Hasil berbeda penelitian Dewi & Husein (2022) berjudul Analisis Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Aceh Barat pada 2022. Tim menyimpulkan inflasi justru berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Aceh Barat.

2.2.3. Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan

Upah Minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang seringkali diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan. Dengan kenaikan upah minimum, diharapkan daya beli masyarakat terutama pekerja berpendapatan rendah akan meningkat. Peningkatan daya beli ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan pada akhirnya berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Dalam teori lingkaran kemiskinan oleh Ragna Nurkse (1953) pendapatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Pendapatan yang rendah mengakibatkan produktivitas masyarakat juga rendah sehingga kemampuan untuk menabung juga rendah.

Penelitian Rozi et al. (2019) berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan jumlah tenaga kerja terhadap Kemiskinan di Kota Jambi Tahun 2000-2017 mengungkap upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan hubungan tersebut bersifat positif, artinya ketika upah minimum meningkat maka tingkat kemiskinan ikut meningkat. Ini disebabkan karena upah yang diterima tidak dapat menutupi kebutuhan pangan keluarga, oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan angka kelahiran supaya kebutuhan

dalam satu keluarga tercukupi dengan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Penelitian Ronald Banito (2022) mengenai Determinan Kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2022 juga mengungkapkan hal senada yaitu variabel UMK signifikan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Fran menyimpulkan Faktor-Faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode waktu 2002-2019 adalah Inflasi, Laju Pertumbuhan PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan Kesehatan Daerah.

2.2.4. Hubungan IPM dengan Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat, di mana peningkatan IPM biasanya berkontribusi pada penurunan kemiskinan. IPM mengukur kualitas hidup melalui tiga dimensi utama: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup (pendapatan per kapita). Ketika IPM meningkat, itu mencerminkan perbaikan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan, individu menjadi lebih produktif dan mampu mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Teori Ragna Nurkse (1953) tentang lingkaran kemiskinan menyebutkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tempat berlindung dan kesehatan menjadi penyebab kemiskinan. Amartya Sen (1976) juga melihat kemiskinan dari dimensi pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi serta kebebasan masyarakat untuk ekonomi.

Pada penelitian Ratu Gandasari (2016) tergambar bahwa tingkat kemiskinan menurun saat IPM meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan IPM yang merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia berakibat pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja penduduk akan meningkatkan perolehan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang meningkat menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta dapat menurunkan kemiskinan.

Hal sama juga terangkat dalam penelitian Karolinska et al. (2023) bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

2.2.5. Hubungan Penduduk dengan Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Ketika penduduk tumbuh pesat, kebutuhan akan sumber daya seperti pangan, air, dan perumahan tentu juga akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, maka banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan juga dapat memperparah laju pertumbuhan penduduk. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk perencanaan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi, yang kemudian memperkuat siklus kemiskinan karena sumber daya keluarga yang terbatas harus dibagi di antara lebih banyak anggota. Menurut Todaro, jumlah penduduk yang meningkat akan berpengaruh positif pada kemiskinan. Hal ini dibuktikannya pada perhitungan indeks Foster Greer Thorbecke dimana jumlah penduduk yang bertambah akan diikuti dengan kemiskinan yang juga meningkat.

Penelitian Nur et al. (2022) menyimpulkan Secara garis besar, kesimpulan penelitian ini yaitu laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan positif namun sangat lemah terhadap kemiskinan. Sementara itu pada penelitian Rudianto et al. (2020) pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Beberapa hal yang mendorong pertumbuhan penduduk untuk mengurangi kemiskinan antara lain peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan perekonomian yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Sedangkan pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap kemiskinan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penduduk yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Agar penelitian ini menghasilkan gambaran dan temuan yang akurat, diperlukan referensi serta studi terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Studi sebelumnya berfungsi untuk membandingkan dan memperkuat hasil penelitian, baik bersangkutan secara langsung ataupun tidak langsung.

Widya Widya et al. (2023) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dimana peningkatan IPM sebanyak 1% akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 8,38%, dengan penurunan tingkat kemiskinan yang besar atau nyata (signifikan). Sedangkan secara simultan variabel pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian lain oleh Sartono (2023) berjudul Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batang Hari menyimpulkan pada jangka panjang pertumbuhan ekonomi, TPT, IPM, pertumbuhan penduduk dan belanja langsung pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Batang Hari. Sedangkan secara parsial hanya variabel TPT yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Batang Hari. Sementara itu dalam jangka pendek, variabel bebas pertumbuhan ekonomi, TPT, IPM, pertumbuhan penduduk dan belanja langsung pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Batang Hari. Sedangkan secara parsial TPT, IPM, Pertumbuhan Penduduk dan Belanja Langsung Pemerintah yang berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dan hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Batang Hari.

Penelitian Bambang Budhijana (2019) berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017 mengungkap

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan meskipun tidak signifikan. Artinya kenaikan Pertumbuhan Ekonomi akan diikuti dengan penurunan kemiskinan walaupun masih belum menghasilkan nilai hasil yang signifikan. IPM juga berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. IPM yang semakin berkualitas akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan dimana saat pengangguran tinggi tingkat kemiskinan juga tinggi.

Suripto & Lalu (2020) pada penelitiannya berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017 menyimpulkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010-2017. Sementara itu pada penelitiannya berjudul Pengaruh Investasi Dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Indonesia, Piang et al. (2023) menggunakan Structural Model (SM) dengan data runtut waktu (time series) dalam periode tahunan yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 berkesimpulan investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Namun investasi secara tidak langsung mempunyai pengaruh negative terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pengangguran secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh secara negative terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian Sinuraya et al. (2021) berjudul *Analysis of Effects of Economic Growth, Human Development Index, Population, Unemployment and Investment on Poverty Levels in the North Sumatra Province* menggunakan Model analisis data dengan Analisa Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menghasilkan pertumbuhan ekonomi, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel pengangguran berpengaruh positif signifikan

terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek namun tidak signifikan dalam jangka panjang dan variabel investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Oratmangun et al. (2021) berjudul *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara* menggunakan teknik Analisis Regresi Berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk runtut waktu (*time series*) yang merupakan data tahunan (2005-2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian secara parsial, Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap angka Kemiskinan di Sulawesi Utara dan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk penelitian secara simultan Pengangguran Terbuka dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara.

Romi et al. (2018) melakukan penelitian Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi selama periode Tahun 2001 - 2015. Alat analisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda dalam bentuk semilog. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah Upah Minimum. Penelitian Kristin et al. (2018) berjudul *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia* menggunakan metode analisis jalur menggunakan software WarpPLS 5.0 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sementara pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian Rahma Damayanti et al. (2022) berjudul *Analysis of the Effect of Economic Growth Rate, Population, Unemployment, and Human Development Index on Poverty in North Sumatra Province 2002-2021* menyimpulkan Laju

Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan (bersama-sama) berpengaruh Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2021. Laju Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2021. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2021 serta Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2021.

Sementara itu penelitian Komang et al. (2021) berjudul *Does Human Development Index (HDI), Investment, and Unemployment Effects on Economic Growth and Poverty Levels? (A Case Study in Bali)* menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan investasi mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian Resmarani & Sishadiyati (2023) berjudul *The Effect of Economic Growth, Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty Rate in North Jakarta* menggunakan metode analisis linier berganda dengan menggunakan SPSS 27 menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Angka Kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi secara Parsial tidak berpengaruh terhadap Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Angka Kemiskinan.

Penelitian lain, Andira et al. (2021) berjudul *Pengaruh Determinan Jumlah Penduduk Miskin Beberapa Negara Asean Tahun 2012-2019* juga mengungkap hal sama. Variable GDP atau pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di beberapa negara berkembang di ASEAN tahun 2012-2019. Hal ini sama dengan penelitian Journal et al. (2012)

berjudul *Is economic growth sufficient for poverty alleviation? Empirical evidence from Malaysia*. Menurut penelitian ini, Malaysia telah berhasil mengentaskan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun populasi Malaysia meningkat dari sekitar 10 juta pada tahun 1960an menjadi sekitar 28 juta pada tahun 2010, namun jumlah penduduk miskin telah menurun secara signifikan. Menggunakan pendekatan pengujian batas Autoregressive Distributed Lag (ARDL) penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan.

Hasil penelitian Usuka (2019) dengan judul *An Analysis of the Determinants of Poverty in India and South Africa* menunjukkan meskipun masalah kemiskinan di India dan Afrika Selatan telah membaik dari masa ke masa, tetapi negara-negara ini masih memiliki jalan panjang untuk dilalui. Namun tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, karena dampak pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang berada dalam situasi paling rentan. Kedua negara harus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan yang bermakna dan tidak terjebak dalam korupsi dan penyalahgunaan. Laporan International Monetary Fund (IMF, 2017) berjudul *Growth Inclusiveness In Armenia* menyebutkan selama pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 2000-an, Armenia mencapai kemajuan yang luar biasa dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Namun, dengan adanya krisis global pada tahun 2007-2009, beberapa pencapaian ini sebagian terbalik karena dampak negatif yang parah terhadap pertumbuhan dan perubahan dalam komposisi pertumbuhan. Meskipun dibandingkan dengan negara-negara sejenis ketimpangan di Armenia tetap rendah, ketimpangan ini sedikit meningkat sejak 2009. Kemiskinan sedikit menurun setelah krisis global, tetapi pengangguran tetap tinggi. Di Papua Barat, melalui penelitiannya berjudul *The determinants of poverty in the West Papua province* oleh Pentury (2023) menggunakan analisis regresi berganda time series, periode 11 tahun untuk menemukan faktor yang mempengaruhi kemiskinan disana. Hasilnya, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama

sekolah berpengaruh negatif dan signifikan. Implikasinya, indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah harus diperluas cakupannya untuk membuka akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Karakteristik wilayah dan jumlah penduduknya cenderung tinggal di pedalaman, sehingga aksesibilitas menjadi faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan di Papua Barat.

Kemiskinan juga masih dirasakan masyarakat Filipina. Pada penelitian berjudul *Alleviating Poverty in the Philippines Through Entrepreneurship cross section model* oleh Cudia et al. (2019) meneliti kewirausahaan sebagai intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan meningkatkan kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan dan tetap berada di atas ambang kemiskinan. Hal ini memiliki implikasi bagi pemerintah dalam menciptakan skema investasi, asuransi, dan stabilisasi pendapatan untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian lain berjudul *Determinants of Poverty in Western Indonesia and Eastern Indonesia* oleh Kurniasari & Oktavilia (2023) menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing langsung, dan pengeluaran sektor kesehatan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian oleh Abdulwasaa & Kawale (2023) berjudul *Determinants of Poverty: A Mini-Review* menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang kerja baru dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meringankan kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga diperlukan untuk menangani kemiskinan. Selain itu, mengurangi tingkat pertumbuhan populasi melalui program perencanaan keluarga di pusat kesehatan, terutama di daerah pedesaan, sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan regresi berganda, model autoregresif terdistribusi (ARDL), model autoregresif (VAR), dan PLS-SEM. Peneliti lain Quispe-Mamani et al. (2022) mengangkat judul *Social Factors Associated with Poverty in Households in Peru*. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan *binary model*. Kesimpulan Mamani, Kemiskinan

di Peru dipengaruhi oleh ukuran rumah tangga berpengaruh positif sebesar 1,3%, pendapatan ekonomi kepala rumah tangga berpengaruh negatif sebesar 0,000828%, tahun pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh sebesar 0,1%, kepemilikan rumah berpengaruh sebesar 0,9%, akses ke program sosial bantuan pangan dan bantuan non-pangan masing-masing berpengaruh sebesar 0,9% dan 0,6%, akses ke layanan air minum, layanan sanitasi, dan layanan listrik memiliki pengaruh negatif sebesar 1,8%, 0,6%, dan 1,7%.

Garza-Rodriguez et al. (2021) mengangkat penelitian berjudul *Determinants of Poverty in Mexico: A Quantile Regression Analysis*. Penelitian ini menggunakan *Binary Regression Models* dan *The Quantile Regression Model*. Hasil regresi kuantil menunjukkan adanya perbedaan signifikan dibandingkan dengan hasil model kuadrat terkecil biasa, terutama untuk rumah tangga dalam kemiskinan ekstrem. Rodriguez menegaskan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pendapatan di seluruh spektrum kemiskinan. Di Ethiopia, Ambisa et al. (2019) melakukan penelitian berjudul *Review on the Current Status of Poverty and Its Determinants in Ethiopia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pengalaman kerja, kepemilikan ternak yang rendah, akses yang minim terhadap informasi pasar, dan jarak dari pasar lokal. Secara umum, fokus pemerintah Ethiopia pada pertumbuhan pertanian dan investasi dalam layanan dasar telah meningkatkan kesejahteraan banyak rumah tangga miskin di negara tersebut.

Di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, Cebula & Davis (2022) melakukan penelitian berjudul *Determinants of poverty in the US state of Virginia: an examination of the impact of rent (the neglected variable)*. Menggunakan Estimasi panel least squares (PLS) penelitian ini mengungkap bahwa kemiskinan berhubungan terbalik dengan pendapatan median dan persentase populasi yang memiliki ijazah sekolah menengah. Selain itu, kemiskinan juga ditemukan berkaitan positif dengan persentase populasi yang bekerja di sektor pertambangan; persentase populasi yang tergolong obesitas; dan tingkat pengangguran. Tingkat sewa bulanan yang lebih tinggi untuk apartemen satu kamar tidur meningkatkan persentase populasi yang hidup dalam kemiskinan. Kenaikan sewa sebesar US\$100

per bulan dapat meningkatkan tingkat kemiskinan keseluruhan di negara bagian tersebut sebesar 1,20–1,35%. Sementara itu di China, Liu et al. (2021) mengangkat penelitian berjudul *Using multiple linear regression and random forests to identify spatial poverty determinants in rural China*. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis untuk mengidentifikasi pentingnya relatif dari berbagai faktor geografis dalam menjelaskan distribusi spasial kemiskinan yaitu metode Lindeman, Merenda, dan Gold (LMG) yang digunakan dalam regresi linier berganda (MLR) dan pentingnya variabel yang digunakan dalam hutan acak (RF) dalam pembelajaran mesin. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) MLR dan RF memiliki akurasi penjelasan yang serupa; (2) LMG dan RF konsisten dalam tiga determinan utama kemiskinan; (3) LMG lebih baik dalam mengidentifikasi pentingnya variabel yang sangat terkait dengan kemiskinan tetapi berkorelasi dengan variabel lain, sementara RF lebih baik dalam mengidentifikasi hubungan non-linear antara kemiskinan dan variabel penjelas; (4) metrik aksesibilitas adalah variabel paling penting yang mempengaruhi kemiskinan di Yunyang dan memiliki hubungan linier dengan kemiskinan.

Studi kasus di India, penelitian Heshmati et al. (2019) dengan judul *An Analysis of the Determinants of Household Consumption Expenditure and Poverty in India*. Penelitian ini melihat dampak karakteristik kepala keluarga (usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan jenis kelamin) serta karakteristik rumah tangga (jenis pekerjaan utama, ukuran rumah tangga, dan status sosial) terhadap pengeluaran per kapita bulanan melalui regresi kuadrat terkondisi (LS) dan regresi kuantil terkondisi. Rumah tangga yang dipimpin oleh individu yang lebih tua, menikah, berasal dari kasta rendah, dan tinggal di negara bagian yang kurang berkembang lebih mungkin berada dalam kemiskinan. Tariq Majeed & Nauman Malik (2015) di Pakistan meneliti *Determinants of Household Poverty: Empirical Evidence from Pakistan* menggunakan teknik regresi logistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan paling tinggi di antara rumah tangga yang kurang berpendidikan dan akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Analisis ini mengusulkan implikasi kebijakan untuk menerapkan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan melalui peningkatan

alokasi belanja pendidikan di semua tingkat.

Dia et al. (2023) melakukan penelitian berjudul *Determinants of poverty among rural farming households in Maiha Local Government Area, Adamawa State, Nigeria*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, model Foster-Greer-Thorbecke (FGT), dan regresi Logit. Hasil model regresi Logit menunjukkan bahwa jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan utama, akses ke kredit, total pendapatan, dan remitansi tahunan memiliki pengaruh positif terhadap status kemiskinan, sementara usia, status perkawinan, dan ukuran rumah tangga memiliki pengaruh negatif terhadap status kemiskinan di antara rumah tangga petani dan signifikan secara statistik pada berbagai tingkat. Sementara itu di Karibia, Kolombia, Marrugo-Arnedo et al. (2015) meneliti *Determinants of Poverty in the Colombian Caribbean Region*. Hasil penemuan mengungkap bahwa tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan ukuran rumah tangga adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan menentukan status sosial ekonomi rumah tangga. Penelitian di Albania juga senada. Penelitian Bici et al. (2017) berjudul *Education as An Important Dimension of the Poverty* mengungkap semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi persentase orang yang hidup dalam kemiskinan untuk individu berusia 21 tahun ke atas. Memiliki pendidikan lebih tinggi adalah indikator penting yang memengaruhi seseorang menemukan pekerjaan yang bergaji tinggi, serta berkontribusi pada pemahaman individu tentang standar hidup lebih baik, layanan kesehatan lebih baik, dan tidak merasa terisolasi.

Kasus kemiskinan di Nepal diteliti oleh Acharya et al. (2022) dengan judul *Factors Affecting Poverty in Nepal - A Binary Logistic Regression Model Study*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Nepal yaitu Kepala rumah tangga yang buta huruf, Rumah tangga yang tidak menerima remitansi, Rumah tangga yang tidak memiliki lahan, Akses buruk rumah tangga ke pusat pasar, Rumah tangga dengan lebih dari dua anak di bawah usia 15 tahun dan Rumah tangga tanpa anggota usia kerja yang melek huruf. Hasil juga menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki tidak lebih baik dibandingkan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan dalam hal

tingkat kemiskinan. Di Negara Bagian Ebonyi, Nigeria, penelitian berjudul *Analysis of Poverty Status of Ebonyi State Farming Households* oleh [Nwahia et al. \(2021\)](#) mengungkap bahwa ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan, jenis kelamin, pengeluaran bulanan rumah tangga, dan ukuran lahan merupakan faktor signifikan yang memengaruhi status kemiskinan rumah tangga petani di Ebonyi. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen pengambilan data elektronik yang berisi kuesioner, dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, model Foster, Greer, dan Thorbeecke (FGT), serta regresi logit.

Sementara itu di Jerman ada penelitian berjudul *Determinants, persistence, and dynamics of energy poverty: An empirical assessment using German household survey data* oleh Drescher & Janzen (2021). Penelitian ini menemukan bukti adanya efek ketergantungan status yang nyata dalam kemiskinan energi, di mana rumah tangga memiliki kemungkinan 7,5% lebih besar untuk mengalami kemiskinan energi jika mereka telah berada dalam kondisi kemiskinan energi pada periode sebelumnya. Kemiskinan energi terkait dengan komposisi rumah tangga, tingkat pendidikan, status angkatan kerja, perumahan yang tidak efisien secara energi, dan sistem pemanas yang digunakan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan energi di Jerman sebagian besar merupakan kondisi sementara. Sedangkan penelitian berjudul *Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis* oleh Anderson et al. (2018) mengungkap hubungan pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan. Penelitian mengidentifikasi total 19 studi ekonometrika lintas negara yang berisi 169 estimasi hubungan ini. Secara keseluruhan, peneliti tidak menemukan bukti yang jelas bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan pendapatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ini konsisten dengan pandangan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran redistributif yang jauh lebih terbatas di negara-negara berkembang, dibandingkan dengan negara-negara OECD.

Penelitian lain berjudul *How do public services supply, livelihood capital, and livelihood strategies affect subjective poverty?* Oleh Lu et al. (2023) yang menganalisis bagaimana penyediaan layanan publik, modal penghidupan, dan

strategi penghidupan memengaruhi persepsi subjektif terhadap kemiskinan. Hasilnya penyediaan layanan publik, modal fisik, modal finansial, dan modal manusia mempengaruhi kemiskinan subjektif penduduk perkotaan dan pedesaan di China pada tingkat signifikansi yang berbeda. Di Kroasia penelitian oleh Škare & Družeta, 2016 berjudul *Poverty And Economic Growth: A Review* memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Analisis membuktikan bahwa saat pertumbuhan terjadi, kemiskinan cenderung menurun. Penelitian itu menyimpulkan bahwa pertumbuhan baik untuk pengurangan kemiskinan, namun itu tidak cukup. Pengurangan kemiskinan yang dicapai tergantung bagaimana kita mengukur kemiskinan serta kapasitas penyerapan masyarakat miskin, laju, dan pola pertumbuhan. Ketika orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin maka efek "trickle-down" menjadi fenomena yang perlu ditinjau lebih lanjut.

1.4. Kerangka Pemikiran

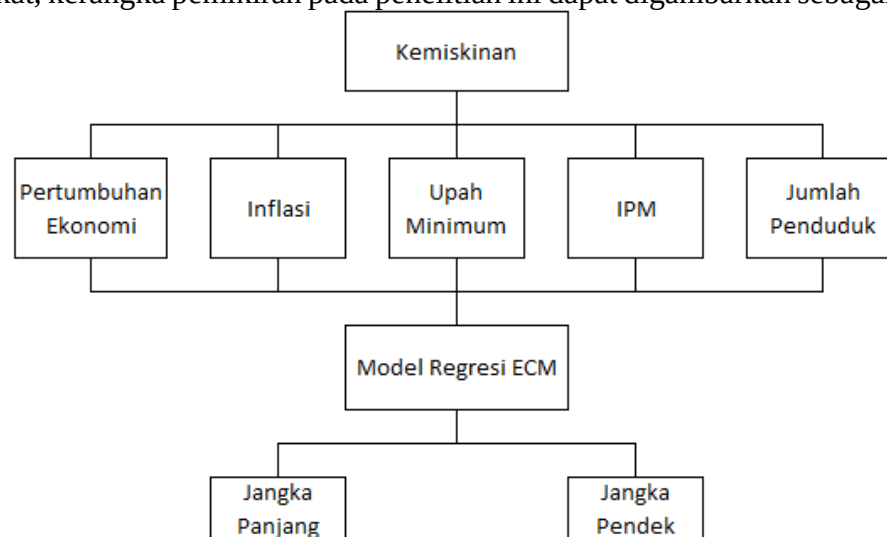
Kemiskinan adalah tujuan pertama yang harus dipecahkan dalam Sustainable Development Goal's (SDGs) Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan bentuk komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan masyarakat. Terdapat 17 tujuan yang telah dideklarasikan negara maju maupun berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015.

Kota Jambi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Meski mengalami kemajuan yang pesat, selama beberapa tahun terakhir kemiskinan di Kota Jambi terbilang tinggi. Persentase penduduk miskin di Kota Jambi pada lima tahun terakhir selalu berada diatas Provinsi Jambi. Jika diurutkan, Persentase penduduk miskin di Kota Jambi menempati peringkat ke enam dibandingkan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dimulai yang tertinggi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun lalu Kota Jambi. Kondisi tingkat kemiskinan di Kota Jambi dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 8,40%.

Dalam mengatasi kemiskinan perlu diketahui penyebab dan karakteristik kemiskinan di daerah itu sendiri karena setiap daerah memiliki faktor yang berbeda. Dalam Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikenal dengan istilah *Vicious*

Cycle of Poverty yang dicetuskan Ragnar Nurkse pada tahun 1953 menggambarkan kemiskinan sebagai suatu siklus yang berulang tanpa ujung pangkal yang jelas. Menurut teori ini, unsur-unsur yang menyebabkan kemiskinan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain hingga menciptakan siklus yang sulit diputus.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan perkembangan kemiskinan Kota Jambi tetapi juga akan meneliti pengaruh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan penduduk terhadap kemiskinan di Kota Jambi pada periode 2002-2024. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah ketika merumuskan strategi jangka panjang serta jangka pendek dalam pengentasan kemiskinan di Kota Jambi. Secara singkat, kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

1.5. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan [ada penelitian ini yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Diduga dinamika Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Jambi.
2. Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Jambi dalam jangka pendek dan jangka panjang.